
BUANA KOMUNIKASI

Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi
<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/buanakomunikasi>

MANAJEMEN PENYEBARAN INFORMASI GEMPABUMI DI MEDIA TELEVISI OLEH BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Dwi Christianto¹

Universitas Budi Luhur Jakarta
dwi.christianto@budiluhur.co.id

Suhendra Atmaja²

STIKOM Interstudi
Prabusiliwangi1973@gmail.com

Nur'aeni³

Universitas Subang
nuraeni@unsub.ac.id

Abstract

None of every government in this world wants its citizens to die as a result of natural disasters. This study aims to reveal how the distribution or dissemination of earthquake disaster information by the Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) on television stations in Indonesia. The research applies the theory of Excellence Communication which is a study concept by James Grunig. The research method was carried out through observation and interviews with BMKG public relations and television station management. The state agency BMKG disseminates earthquake information which is automatically received by television stations and then decided by the editorial department to be broadcast immediately in the form of an 'interval' program that cuts off the ongoing program. Researchers found that BMKG had implemented an Excellence Communication Public Relations program to television stations and had implemented standard operating information dissemination about earthquake disasters.

Keywords: Disaster, BMKG, Information, Earthquake, Television

Abstrak

Semua pemerintah di dunia ini tidak mau warga negaranya meninggal akibat bencana alam. Penelitian ini ingin mengungkap bagaimana penyebaran atau diseminasi informasi bencana gempabumi bumi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di stasiun televisi di Indonesia. Penelitian menerapkan teori Excellence Communication yang merupakan konsep studi oleh James Grunig. Metode penelitian dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada Humas BMKG dan manajemen stasiun televisi. Lembaga negara BMKG menyebarkan informasi gempabumi secara otomatis diterima oleh stasiun televisi kemudian diputuskan oleh bagian redaksi untuk ditayangkan seketika dalam bentuk program 'interval' yang memotong program yang sedang berlangsung. Peneliti menemukan bahwa BMKG telah menjalankan program Humas secara Excellence Communication kepada stasiun televisi dan telah menjalankan standar operasi penyebaran informasi tentang bencana gempabumi.

Kata kunci: Bencana, BMKG, Informasi, Gempabumi, Televisi

**BUANA
KOMUNIKASI**

Jurnal Penelitian & Studi
Ilmu Komunikasi
Volume 04
Nomor 02
Halaman 138-155
Bandung, Desember 2023

p-ISSN : 2774 - 2342
e-ISSN : 2774 - 2202

Tanggal Masuk :
23 Agustus 2023
Tanggal Revisi :
21 September 2023
Tanggal Diterima :
23 Desember 2023

PENDAHULUAN

Gempabumi, badai dan bencana lainnya, pada kurun periode tahun 1970 sampai 2010, telah menyebabkan 3,3 juta orang meninggal dunia dengan rata-rata 82.500 korban kehilangan nyawa tiap tahunnya. Jumlah tersebut, merupakan bagian dari 60 juta jiwa orang di dunia yang meninggal dunia pertahun, termasuk di dalamnya sebanyak 1,27 juta korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas (Wiji utomo, 2012). Peristiwa gempabumi menjadi catatan sejarah kelam tiap bangsa dan negara yang pernah didera bencana. Beberapa gempabumi besar pernah terjadi di dunia. Seperti gempabumi 9,5 Skala Richter (SR) yang terjadi pada 22 Mei 1960 – di Chile, yang mengguncang Santiago dan Concepcion, menimbulkan gelombang laut dan letusan gunung api. Sedikitnya 5000 penduduk setempat meninggal dunia sedangkan dua juta orang lainnya kehilangan rumah (Mutia annur, 2023).

Pada 26 Desember 2004 – di Indonesia, terjadi gempabumi 9,1 SR melanda pesisir Provinsi Aceh, yang menyebabkan 226 ribu orang di Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India, dan sembilan negara lainnya, kehilangan nyawa. Kemudian, pada 11 Maret 2011 – gempabumi dengan kekuatan 9 SR menyerang Jepang, lebih dari 15 ribu orang meninggal dunia. Gempabumi terkuat yang pernah terjadi di Jepang. Tsunami juga menerjang dan memporakporandakan pusat pembangkit nuklir. Akibatnya terjadi krisis nuklir paling parah selama 25 tahun terakhir di Jepang (Smith, 2017). Terdapat juga gempabumi 7,4 SR, tsunami dan likuefaksi yang melanda Palu dan Donggala, Sulawesi Barat, Indonesia, pada 28 September 2018, menelan korban jiwa mencapai 4.340 orang (Emerald alamsyah, 2019).

Tidak ada yang tahu kapan datangnya bencana gempabumi, peristiwa dapat terjadi secara mendadak di waktu dan tempat mana saja, dalam zona kegempabumian bumi. Sehingga yang mungkin dijalankan yakni melaksanakan mekanisme penyebaran informasi getaran bumi dan sistem peringatan sebelum (*early warning system*) gelombang besar. Sistem ini digunakan untuk memberi tanda atau bunyi bahaya jika kapan saja terjadi gempabumi.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerapkan sistem tanda sebelum kebencanaan gempabumi. Lembaga BMKG memasang rangkaian seismograph di daerah-daerah rawan gempabumi. Seismograph dihubungkan langsung satelit dan *server* sekaligus dikembangkan mekanisme penyebaran informasi informasi getaran bumi dan sistem peringatan sebelum gelombang besar melalui teknologi RANET. Sistem ini menggunakan saluran komunikasi satelit dari worldspace untuk menghubungkan data getaran bumi dari server RANET ke server 5 in 1 SMS gateway, lalu mengirimkan SMS, fax dan bunyi tanda kepada para pelanggan yang sudah terdaftar di server 5 in 1 jika ada gempabumi dan gelombang besar. Karena biaya yang cukup tinggi, layanan satelit ini tidak lagi tersedia dan sistem ini sudah disetop. Sebagai lembaga negara non kementerian, BMKG memiliki bagian komunikasi organisasi (komorg) yang melaksanakan fungsi hubungan antara organisasi dengan masyarakat.

Keunggulan Komunikasi berasal dari Penelitian Keunggulan, yang dilakukan oleh Grunig dan timnya yang terdiri dari David Dozer, Larissa Grunig, William Ehling, Fred Repper, dan John White. Penelitian Hubungan Masyarakat ini didukung oleh International Association of Business Communicators (IABC). Penelitian Keunggulan menghasilkan Teori Keunggulan yang membahas peran dan fungsi yang ideal bagi praktisi hubungan masyarakat di dalam suatu lembaga atau organisasi. Inti dari Teori Keunggulan adalah membahas peran dan fungsi yang ideal dalam Komunikasi Keunggulan, yang menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi untuk mencapai keberhasilan tinggi dalam organisasi atau lembaga melalui pelaksanaan tugas hubungan masyarakat yang efektif (L. A. Grunig et al., 2003).

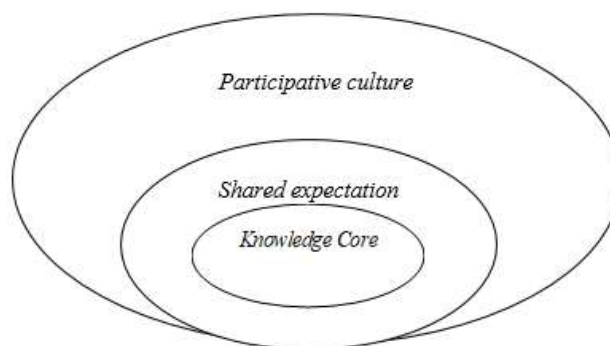
Tiga elemen kunci dalam Excellence Communication adalah inti pengetahuan (*knowledge core*), ekspektasi bersama (*shared expectations* dengan koalisi dominan), dan budaya

partisipatif (participative culture dalam organisasi). Knowledge core merujuk pada pengetahuan dasar yang dimiliki oleh komunikator mengenai peran manajerial dan strategi operasional, serta bentuk komunikasi yang dianggap ideal dalam konteks organisasi. Konsep komunikasi yang dianggap ideal oleh Excellence Communication adalah komunikasi dua arah antara organisasi dan publik. Jenis komunikasi ini dapat berupa komunikasi asimetris dan simetris (J. E. Grunig, 2013).

Salah satu unsur penting dalam Komunikasi Unggul adalah ekspektasi bersama (shared expectations) dengan koalisi utama. Keberhasilan dalam mencapai hal ini bergantung pada hubungan yang baik antara komunikator atau Humas dengan pihak yang berpengaruh di dalam organisasi, yang disebut sebagai koalisi utama. Koalisi utama memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan organisasi. Seorang Humas yang efektif dalam komunikasinya akan menjadi individu yang dipercaya oleh anggota koalisi utama (L. A. Grunig et al., 2003)

Selain itu, dalam Komunikasi Unggul, ada unsur ketiga yang disebut sebagai budaya partisipatif. Bagian ini membahas pentingnya budaya organisasi yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan Komunikasi Unggul. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang besar; organisasi tidak akan efektif dan tidak akan berhasil dalam menerapkan program-program yang berfokus pada Unggulan jika budaya di dalamnya cenderung otoriter, dengan dominasi hierarki kepemimpinan yang kuat, karyawan yang tidak memiliki kebebasan untuk mengutarakan pendapat mereka mengenai keputusan atau kebijakan organisasi, kurangnya kerjasama, dan kurangnya penerimaan umpan balik dari sumber luar. Budaya organisasi yang paling cocok untuk mendukung Komunikasi Unggul adalah budaya partisipatif yang menghargai kerjasama (L. A. Grunig et al., 2003).

Komunikasi Unggul dapat dibagi menjadi tiga bidang (sphere). Bidang pertama, yang terletak di tengah, adalah inti pengetahuan atau knowledge core yang dimiliki oleh Humas. Bidang kedua, yang berada di luar bidang pertama, adalah harapan bersama atau shared expectation, yang mengacu pada harapan bersama dengan koalisi utama terkait dengan komunikasi dua arah. Bidang terluar dari Komunikasi Unggul adalah budaya partisipatif atau participative culture, yang merujuk pada budaya organisasi yang bersifat partisipatif. Anda dapat melihat tiga bidang Komunikasi Unggul dalam gambar berikut ini.



Gambar 1. Tiga bulatan *excellent communication*

Sumber: (L. A. Grunig et al., 2003)

LITERATUR

Manajemen Komunikasi

Pengelolaan komunikasi dapat diuraikan dengan menguraikan dua konsep, yaitu "Pengelolaan" dan "komunikasi." Pengelolaan adalah ilmu yang melibatkan perancangan, penyusunan, dan penataan untuk menuntaskan pekerjaan dengan melibatkan orang lain dalam proses tersebut. Sementara itu, komunikasi adalah proses di mana individu atau

kelompok mengirimkan informasi untuk membangun relasi dengan individu atau kelompok lain.

Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi menjabarkan konsep komunikasi dan prinsip-prinsip pengelolaan yang diterapkan dalam berbagai konteks komunikasi. Selain itu, seperti yang dilaporkan oleh (Maxmanoe.com, 2019) beberapa ahli juga memberikan definisi pengelolaan komunikasi, yang mencakup:

1. Michael Kaye, menjelaskan cara setiap orang mengatur interaksi komunikasinya dengan orang lain dalam berbagai situasi komunikasi. Ini mencakup berbagai jenis komunikasi, seperti komunikasi antarmanusia, komunikasi dalam kelompok, dan komunikasi yang bersifat massal.
2. Parag Diwan, ini menunjukkan bahwa manajemen komunikasi adalah proses yang melibatkan pemanfaatan sumber daya komunikasi yang beraneka ragam dengan merancang, mengatur, menjalankan, dan mengawasi semua unsur komunikasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan..
3. Joan Gratto Liebler and Larry L. Barker, Ini menjabarkan bahwa manajemen komunikasi adalah proses teratur di antara individu atau kelompok untuk mengurus fungsi-fungsi manajemen guna mencapai sasaran bersama. Proses ini melibatkan tawar-menawar pemahaman di antara individu atau lebih dengan maksud mencapai sasaran bersama. Dalam konteks pencapaian tujuan organisasi atau kelompok, fungsi POAC (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengendalian) seperti yang disampaikan oleh George R. Terry dalam (Daado et al., 2023) diperlukan.

Selanjutnya, George R. Terry dalam (Daado et al., 2023) menjelaskan POAC sebagai berikut:

- a. Perencanaan (Planning), merupakan prosedur yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah tertentu. Selain itu, perencanaan juga dapat dijelaskan sebagai tindakan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, termasuk menetapkan tujuan dan standar, merumuskan aturan dan prosedur, serta mengembangkan rencana dan strategi
- b. Pengorganisasian (Organizing), mencakup tugas seperti mengalokasikan tugas kepada individu yang relevan, membentuk struktur organisasi, melakukan delegasi dan menentukan wewenang, membentuk sistem komunikasi, serta mengkoordinasikan anggota. Fungsi pengorganisasian juga mencakup upaya untuk menyatukan beragam individu dalam kelompok yang berfungsi secara harmonis, dengan tujuan mengarahkan mereka menuju kepentingan bersama dan mengoptimalkan kemampuan mereka secara sinergis
- c. Penggerakan (Actuating), merupakan upaya untuk mencapai kinerja yang optimal dan meningkatkan efisiensi. Ini mencakup pencapaian keselarasan antara hasil kerja dengan rencana yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- d. Pengawasan (Conrolling), pengawasan memiliki nilai dalam memantau pelaksanaan program di lapangan, dengan tujuan untuk menilai apakah berjalan dengan baik atau ada penyimpangan. Pengawasan dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, termasuk pengendalian preventif (pengawasan sebelum pelaksanaan program) dan pengendalian represif (pengawasan setelah pelaksanaan program)

METODE PENELITIAN

Terdapat beberapa studi kasus terkait pentingnya penerapan *Excellence Communcation* agar mencapai keberhasilan organisasi. Penelitian terdahulu merupakan penelitian pada suatu perusahaan ekonomi di Amerika tentang *Excellence Communication*. Penelitian itu

menjelaskan kondisi Humas perusahaan yang menjalankan kriteria pengetahuan Humas secara ideal. Akan tetapi, peran dan fungsi Humas seringkali tidak terwujud secara maksimal karena kurangnya dukungan dan pemahaman yang sama dengan pimpinan mengenai peran dan komunikasi perusahaan. Hal ini menyebabkan penilaian rendah terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai Komunikasi Unggul (L. A. Grunig et al., 2003).

Penelitian terdahulu mengenai Komunikasi Unggul di Indonesia meliputi studi tentang bagaimana Peran Humas Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menerapkan prinsip-prinsip Komunikasi Unggul yang dikembangkan oleh James Grunig dalam Teori Keunggulan (Wyman, 1999). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Komunikasi Unggul telah diimplementasikan di BTN, namun belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Grunig. Komunikasi dalam organisasi masih bersifat asimetris, dan posisi Humas tidak memiliki akses langsung ke pimpinan, sehingga tidak terlibat dalam rapat pembuatan keputusan bersama dengan dewan direksi. Dalam konteks ini, Humas dapat menggunakan sekretaris perusahaan sebagai penghubung untuk menyampaikan masukan dan pandangan yang mereka dapatkan dari publik kepada pimpinan.

Melalui pelaksanaan peran Humas BMKG, peneliti ingin menilai penerapan *Excellence Communication* dalam manajemen komunikasi publik di BMKG terkait penyebaran informasi gempabumi kepada televisi nasional. Apakah BMKG telah menjalankan perannya sesuai dengan standar komunikasi yang unggul, yang merupakan konsep komunikasi publik universal, dan apakah konsep ini dapat diterapkan di badan pemerintah non kementerian? Melalui konsep yang dikemukakan Grunig, sejauh mana *Excellence Communication* dapat diterapkan dalam penyebaran informasi gempabumi serta, apa elemen-elemen apa saja yang menjadi penghalang dalam menerapkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMKG, yang merupakan singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, adalah sebuah Instansi Pemerintah Non Kementerian (IPNK) yang dikepalai oleh seorang Pimpinan Badan. Tugas pokok BMKG adalah menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis mengutip nara sumber pertama (1) Drs. Mochhammad Riyadi, M.Si.: Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yang menjelaskan bagaimana kebijakan yang selama ini ditempuh oleh BMKG dalam membuat dan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP atas informasi gempa yang masuk dan terdeteksi oleh alat seismograf yang dimiliki oleh BMKG. Penyampaian informasi di BMKG diselenggarakan oleh Pusat Jaringan Komunikasi (Pusjarkom), yang merupakan salah satu bagian dari struktur organisasi Deputi yang mengurus bidang Instrumentasi Kalibrasi Rekayasa dan Jaringan komunikasi. Pusat jaringan ini telah berjalan sejak BMKG dibentuk pada tahun 2009.

Secara umum tugas dan fungsi Pusjarkom; adalah untuk membangun dan mengurus sistem komunikasi dan internet yang mengedepankan keamanan dan kualitas data dalam lingkup Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pusat Jaringan Komunikasi bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi dari berbagai pusat lainnya, termasuk CMSS, pusat AWS, situs web, sistem email, dan lain-lain. Selain itu, Pusat Jaringan Komunikasi juga berperan sebagai pusat pengelolaan arus data dan informasi di BMKG.

Sistem komunikasi yang dipakai untuk menyebarluaskan peringatan dini tentang gempa bumi dan tsunami di Indonesia dibuat dengan pendekatan multi moda, dengan harapan bahwa paling tidak salah satu moda akan berhasil sampai ke tujuannya tepat waktu. BMKG,

selain tidak memiliki kewajiban, juga tidak memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan informasi secara langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah antarmuka atau penghubung antara BMKG dan masyarakat.

Jaringan penghubung ini adalah lembaga yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi. Institusi Penghubung ini terdiri dari berbagai entitas, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), stasiun radio dan televisi, Radio Pantai, serta penyedia layanan GSM/CDMA.

Saat ini Sistem Diseminasi BMKG menggunakan enam bentuk sistem penyebaran informasi atau diseminasi media penyebaran informasi yang dapat dijelaskan penulis melalui studi literatur sebagai berikut:

a. Sistem Diseminasi SMS

Sistem penyebaran menggunakan telepon seluler untuk mendapatkan berbagai informasi, seperti peringatan gelombang laut raksasa, data tentang getaran bumi, perkiraan cuaca, dan tingkat kualitas udara. Sistem penyebaran pesan teks ini memiliki dua jalur pengiriman yang berbeda, yaitu Layanan Respons Otomatis dan Layanan Kirim Otomatis atau Layanan Dorong.

b. Sistem Diseminasi Email

Dengan memanfaatkan pos elektronik (email), data tentang gempa bumi dapat dikirimkan secara lengkap dalam format pesan panjang. Untuk mendapatkan data dari BMKG melalui email, pengguna perlu mendaftarkan alamat email mereka di BMKG terlebih dahulu. Data yang diterima melalui email dapat berupa informasi terkait gempa bumi atau peringatan gelombang laut raksasa.

c. Sistem Diseminasi Fax

Dengan menggunakan layanan salinan jarak jauh (fax), informasi dapat disampaikan dalam format yang komperhensif. Seperti layanan kirim pesan otomatis (autosender) melalui SMS, nomor faksimili dari suatu lembaga perlu didaftarkan terlebih dahulu dengan BMKG.

d. Sistem Diseminasi Web

Sistem distribusi melalui web adalah jenis layanan yang bersifat tidak aktif dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Disebut sebagai layanan tidak aktif karena pengguna harus aktif berselancar di internet untuk mengunjungi situs BMKG.

e. Sistem Diseminasi GTS

GTS kepanjangan dari *Global Telecommunication System*. GTS digunakan oleh *World Meteorological Organization* (WMO) memakai GTS untuk menyebarluaskan informasi kepada berbagai pusat pemrosesan meteorologi yang terkait dengan jaringan WMO. Aplikasi GTS akan mengirimkan pesan kepada pusat pemrosesan data meteorologi di semua negara yang terkait dengan jaringan WMO, termasuk Indonesia.

f. Sistem Diseminasi WRS

Fasilitas komunikasi yang disebut Sistem Penerima Peringatan atau WRS memungkinkan pertukaran informasi dari komputer BMKG ke komputer lembaga mitra. Setiap lembaga mitra harus mendaftarkan IP address mereka ke BMKG agar dapat menerima informasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis fokus menjelaskan tentang system diseminasi WRS yang diterima oleh redaksi stasiun televisi atas informasi kegempabumian yang terjadi.

Peringatan Dini-1:

Parameter gempabumi + prediksi daerah yang akan terkena tsunami)



Peringatan Dini-2:

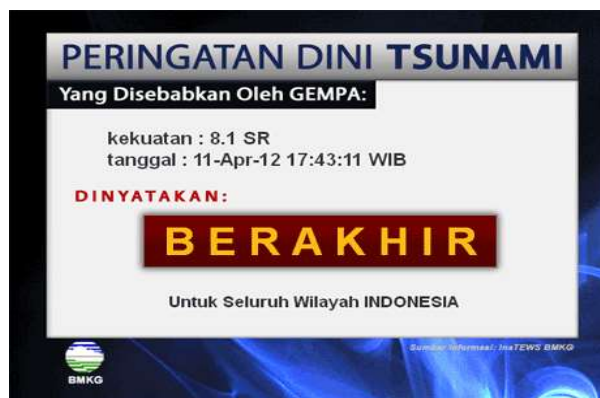
(Pemutakhiran parameter gempabumi + prediksi daerah yang akan terkena tsunami)



(Pemutakhiran Parameter gempabumi + prediksi daerah yang akan terkena tsunami + data observasi tinggi muka laut yang telah terjadi (bila ada))



Pemberitahuan bahwa bahaya tsunami telah berlalu)

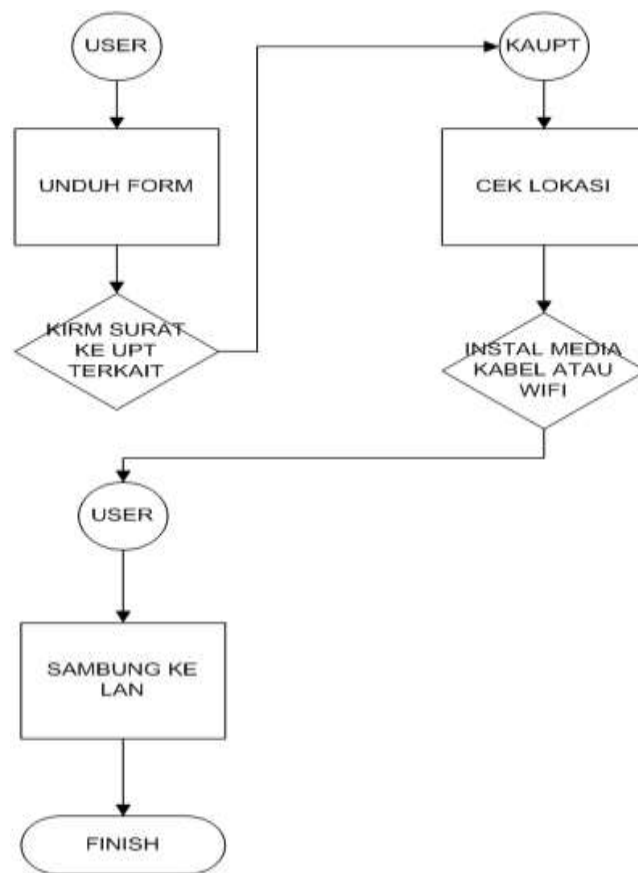


Gambar 2. Contoh tampilan WRS untuk institusi interface -- khusus TV

Dalam penerapan aplikasinya, media televisi swasta nasional maupun TVRI telah menerima seperangkat komputer yang selalu terhubung *online* melalui Alokasi *IP Address* dan segmentasi VLAN di kantor BMKG pusat. Ini sangat diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan *IP Address* pada masing-masing bagian atau bidang yang cukup besar dan berguna membedakan masing-masing bagian atau bidang itu sendiri. Hal ini memudahkan pemeliharaan jaringan yang terhubung, antara kantor di BMKG dan media televisi yang menjadi mitra BMKG. Berdasarkan riset literatur di BMKG, penulis mendapatkan data bahwa *IP Address* Jaringan LAN di Kantor BMKG Pusat dibagi ke dalam beberapa bagian/bidang atau lebih dikenal dengan segmentasi jaringan, pada masing-masing segmentasi itu sendiri memiliki *IP Address* yang berbeda dengan bagian/bidang yang lain di kantor pusat BMKG.

Prosedur instalasi baru jaringan LAN yang peneliti amati di BMKG dan instalasi yang bekerja sama dengan BMKG, dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses dimulai ketika *helpdesk* menerima surat permohonan resmi berupa isian [Formulir Permintaan Akses Jaringan](#) dari bidang/sub bidang yang bersangkutan yang diketahui terlebih dahulu oleh sub bidang infrastruktur jaringan BMKG.
2. Selanjutnya teknisi jaringan atas perintah dari kepala sub bidang infrastruktur Jaringan BMKG akan melakukan survei ke bidang/sub bidang itu. Setelah melakukan survei maka teknisi jaringan membuat layout dan waktu pelaksanaan, lalu di masukan kedalam arsip jaringan. Hal ini berlaku bagi pemasangan *server* di stasiun televisi yang telah bekerja sama dengan BMKG.
3. Kemudian teknisi jaringan melaporkan kepada Kepala sub bidang infrastruktur Jaringan untuk di cek apakah logistik yang diperlukan tersedia atau tidak. Apabila logistik tersedia maka instalasi dapat dilaksanakan, tetapi apabila logistik tidak tersedia maka akan disusun pengadaan barang untuk pemasangan selanjutnya.
4. Selanjutnya Apabila sudah dapat dilaksanakan proses instalasi jaringan LAN maka teknisi jaringan segera melakukan proses instalasi.
5. Setelah itu teknisi jaringan melakukan konfigurasi akses pada *switch* sesuai dengan permohonan yang diberikan yang selanjutnya membuat berita acara instalasi dan ditandatangani oleh pejabat terkait.
6. Kemudian berita acara yang di buat diberikan kepada *helpdesk* untuk dimasukan ke dalam arsip jaringan.
7. *Helpdesk* melaporkan berita acara kepada Kepala Sub Bidang Infrastruktur Jaringan bahwa proses instalasi telah selesai dilakukan.



Gambar 3. Prosedur Instalasi Baru Jaringan LAN
Sumber: (Rafael Alesandro Marbun, 2023)

Sementara itu *server* media televisi nasional ditempatkan di Kantor Pusat masing-masing. Penulis selanjutnya mengkonfirmasi letak *server* kepada narasumber 3, 4, 5 dan 6 yang ditempatkan oleh stasiun televisi yang menjadi tempat penelitian, Seperti di:

1. Metro TV, di Jl. Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2. **TV One**, di Jl Rawa Terate II No 2, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur.
3. SCTV dan Indosiar, di SCTV Tower, Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat.
4. **TVRI Siaran Nasional**, di tempatkan di Jl. Gerbang Pemuda Senayan, Jakarta Pusat.

Dari 11 televisi nasional, penulis mengambil empat sampel media televisi swasta nasional dan satu Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Karena Metro TV dan TV One memiliki porsi pemberitaan yang lebih besar, di banding media televisi swasta nasional lainnya. Demikian pula dengan SCTV dan Indosiar, yang ruang redaksinya saat ini telah dalam satu tapuk kepemimpinan pemimpin redaksi dan masih dipercaya oleh masyarakat dalam menyajikan informasi berita yang cepat tepat dan akurat. Selain itu, tidak bisa dipungkiri kehadiran TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, telah memiliki jaringan pemancar yang luas, menjadi penilaian tersendiri bagi penulis, untuk memasukkan TVRI menjadi sampel penelitian ini.

Terkait penempatan *server* informasi dini gempabumi, narasumber 1 menjelaskan pemeliharaan *server* berada di salah satu dinas yang telah ditunjuk oleh instansi BMKG dengan berkoordinasi dengan manajemen televisi nasional yang telah menjalin kerjasama.

Sehingga timbal balik yang terjadi dalam interaksi antar *server*, akan selalu terpantau dengan alur yang lancar. Jika terdapat kerusakan di *server* yang terdapat di masing-masing kantor stasiun televisi nasional, maka manajemen redaksi dengan segera memberitahu kepada staf BMKG yang telah ditunjuk, untuk segera memperbaikinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Informasi tentang terjadinya gempabumi secara otomatis diterima melalui mekanisme *Warning Receiver System* atau WRS, ini adalah alat komunikasi yang memfasilitasi berbagi informasi dari komputer BMKG kepada komputer di institusi antarmuka, seperti pemerintah lokal dan lembaga pemerintahan lainnya., TNI, POLRI, media TV & Radio dll). Khusus untuk televisi nasional, tiap *server* yang berada di kantor masing-masing televisi akan menerima informasi cepat dan serentak mengenai informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami. Namun data informasi gempabumi yang terjadi, tidak selalu disalurkan langsung kepada institusi *interface*, khususnya televisi nasional. Kepala pusat gempabumi bumi dan tsunami beserta jajarannya, terlebih dahulu akan menganalisa besaran gempabumi dan dampaknya. Apalagi jika gempabumi itu berpotensi tsunami.

Jajaran BMKG menempatkan petugasnya, dalam pembagian kerja tiga *shift* dalam kurun 24 jam tiap hari. Agar analisa gempabumi dapat dipelajari dan disebarluaskan sesuai dengan informasi yang terjadi di lokasi gempabumi. Narasumber 1 menjelaskan bagaimana mekanisme penjabaran SOP dalam menyebarkan informasi gempabumi yang dilakukan oleh BMKG sehingga dalam paling lama 5 menit pascagempabumi terjadi, informasi gempabumi tersebut dapat langsung tersebar ke media massa khususnya media televisi. Dengan menginformasikan parameter gempabumi, yang terdiri dari:

1. Waktu terjadinya gempabumi(*Origin Time - OT*)
2. Lokasi pusat gempabumi(*Episenter*)
3. Kedalaman pusat gempabumi(*Depth*)
4. Kekuatan Gempabumi(*Magnitudo*)

Analisis tersebut kemudian dikirim dari BMKG melalui *server* ke media televisi nasional dalam hitungan paling lama lima menit, setelah informasi gempabumi diperoleh oleh *server* melalui sistem WRS. Hal ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan secara nasional maupun internasional dalam penyebaran informasi gempabumi.

Dalam mekanisme di Pusat gempabumi dan tsunami BMKG, narasumber 1 menjelaskan hampir seluruh pengawai di jajarannya, selalu lebih aktif mencari informasi tentang situasi organisasi yang terjadi. Informasi gempabumi yang masuk dengan segera dianalisa dan dilakukan pendekatan-pendekatan berdasarkan parameter gempabumi yang terjadi. Selanjutnya, para petugas segera memberi informasi yang telah dianalisa tersebut kepada atasan, termasuk narasumber 1 untuk ditindaklanjuti. Apalagi jika besaran gempabumi terbilang signifikan di atas enam skala richter dan berpotensi tsunami. Karakteristik gempabumi menurut *Buku Gempabumi Bumi* yang diterbitkan Litbang BMKG (Kunci, 2010), yakni: peristiwa ini terjadi dalam periode yang sangat pendek, terjadi di lokasi tertentu, dan dapat menyebabkan bencana. Peristiwa semacam ini memiliki potensi untuk terulang, tidak dapat diprediksi, dan tidak dapat dihindari, tetapi dampak yang dihasilkan dapat diminimalkan.

Penulis juga mendapatkan informasi dari nara sumber dua (2), yakni; Kepala bagian hubungan masyarakat BMKG Drs. Eko Suryanto yang menjelaskan mekanisme kerjasama BMKG dengan pihak televisi nasional dan bagaimana mempertahankan alur komunikasi yang terbentuk selama ini.

Karena informasi gempabumi yang berpotensi tsunami, dapat diprediksi kemungkinan besar akan menimbulkan dampak kerusakan atau bencana bagi daerah yang terlanda dan terdampak. Narasumber 2 menyatakan informasi gempabumi membutuhkan penyebaran yang lebih masif dalam penyampaianya, baik dari tingkat bawah hingga tingkat pimpinan di BMKG. Apalagi info tersebut harus segera disebar ke beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, BNPB daerah, media massa dan elemen masyarakat lainnya. Termasuk informasi seputar akibat Gempabumi, yakni: Getaran tanah (ground shaking), peristiwa likuifaksi (liquifaction), pergeseran tanah, gelombang laut, serta ancaman-ancaman lain (seperti hubung singkat, kebocoran gas yang bisa menimbulkan api, dan sebagainya)

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Kerusakan Akibat Gempabumi, menurut nara sumber 2 yaitu; Faktor-faktor seperti intensitas gempa, kedalaman episenter gempa, jarak dari pusat gempa, durasi getaran gempa, karakteristik tanah di wilayah tertentu, serta keadaan bangunan menjadi pertimbangan penting. Dalam sebuah organisasi, untuk mencapai tingkat prestasi yang optimal, semua aktivitas dan upaya yang dilakukan dalam organisasi harus sejalan dengan visi dan misi organisasi itu sendiri, yang menjadi tujuan utama dalam menjalankan organisasi.

Dari hasil wawancara penulis dengan narasumber 1 terlihat visi dan misi BMKG dijalankan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan oleh staf informasi gempabumi BMKG. Meski demikian ada beberapa staf BMKG ini mungkin tidak memiliki pemahaman yang eksak tentang visi dan misi organisasi tempat mereka bekerja, tetapi pada dasarnya, mereka mengerti bahwa tugas pekerjaan mereka adalah melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin

Setelah melakukan pengamatan, penulis tidak menemukan tanda atau penulisan visi dan misi organisasi BMKG yang dipasang di dinding area tempat para staf bekerja. Hal ini, meskipun hanya sebagai pengingat dan untuk membantu memotivasi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Interaksi antara BMKG dengan individu di media televisi nasional, dijelaskan oleh Narasumber 1 bahwa BMKG dalam setahun selalu merencanakan untuk menggelar pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa, termasuk pemimpin redaksi televisi swasta nasional maupun TVRI, untuk memperbaharui informasi tentang gempabumi yang terjadi kurun waktu tahun yang berjalan. Sehingga perkembangan informasi gempabumidan perkembangan di kawasan yang terlanda, akan menjadi perhatian awak redaksi untuk ditindaklanjuti dan disiarkan kepada publik.

Narasumber 1 menjelaskan, BMKG mengundang para pemimpin redaksi dari televisi swasta nasional maupun TVRI, agar dapat bertukar pikiran tentang apa saja yang menjadi perkembangan informasi kegempabumian di Indonesia dan bagaimana seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dapat menyikapi kondisi tersebut. Selain itu, para pemimpin redaksi kembali disegarkan akan pentingnya informasi dini gempabumiyang terjadi, apalagi informasi gempabumi yang diperkirakan disertai oleh tsunami. Karena pencapaian informasi yang cepat dan tepat kepada masyarakat atau pemirsa televisi nasional akan menentukan bagaimana masyarakat di sekitar lokasi terjadinya gempabumi dan masyarakat lain yang berkepentingan, dapat melakukan mitigasi atau penanganan bencana dengan cepat.

Sejauh ini, narasumber 1 menilai ada salah persepsi yang diterima oleh para pimpinan redaksi televisi nasional. Ketika undangan disebar dan jadwal pertemuan antara pimpinan redaksi dengan pimpinan BMKG telah ditentukan tanggal dan harinya, namun sebagian besar pemimpin redaksi tidak datang. Bahkan ada asumsi bahwa pertemuan tersebut merupakan konferensi pers dari BMKG kepada media massa. Akibatnya, awak

redaksi yang datang dalam pertemuan tersebut, diwakilkan oleh tim liputan (reporter dan juru kamera) dari media televisi nasional yang bersangkutan.

Hal ini mengakibatkan pesan akan sistem yang ingin dibangun oleh BMKG dalam menerapkan penyebaran informasi gempabumi, menjadi tidak sampai kepada pemimpin redaksi atau manajemen televisi nasional yang diundang. Apalagi, penyampaian dan pembahasan dalam undangan diskusi terhadap para pemimpin redaksi, dalam penyampaian informasi gempabumi kepada masyarakat, dilakukan dengan tema-tema yang agak detil dan dalam kerangka penjelasan prosedur serta sistem alur komunikasi informasi gempabumi dari BMKG kepada media massa. Bukan hanya mengenai informasi kegempabumian terkini yang dapat menjadi konsumsi berita.

Narasumber 2 menyatakan, Humas BMKG dalam penyampaian informasi gempabumi mengambil peran sebagai pihak *observator* atau pemantau. Jika dalam pemberitaan tentang gempabumi bumi serta tsunami, yang berbeda dari analisa tim BMKG, maka humas akan berperan untuk meluruskan pemberitaan tersebut. Karena pemberitaan yang disiarkan oleh media televisi nasional, berasal dari produk komunikasi langsung dari pemberi pesan (tim pusat gempabumi dan tsunami BMKG) dengan penerima pesan (awak redaksi media televisi nasional).

Seluruh informasi gempabumi dari BMKG kepada televisi nasional, saat ini masuk melalui *server* dengan mekanisme *Wireless Receiver System WRS*. Sehingga sesaat setelah informasi gempabumi masuk maka secara otomatis dalam hitungan paling lambat lima menit, informasi gempabumi masuk ke *server* media televisi swasta nasional, termasuk TVRI.

Penulis mengkonfirmasi informasi dari Narasumber 1 dan 2 dengan Narasumber ketiga (3) Wayan Eka Putra: News Service Manager PT. Media Televisi Indonesia (Metro TV), narasumber keempat (4) Wakil Pemimpin Redaksi SCTV Putut Tri Husodo dan nara sumber kelima (5) Wakil Pemimpin Redaksi TV One Totok Suryanto, serta narasumber keenam (6) Jurnalis Senior/ Mantan *General Manager News* Pemberitaan Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI, Pipiet Irianto.

Dalam menyikapi informasi gempabumi yang terjadi, tiap awak redaksi ternyata memiliki sikap yang berbeda dalam menindaklanjuti informasi gempabumi yang masuk ke *server* di tiap-tiap ruang redaksi. Narasumber 3 mengungkapkan sikap tersebut berbeda, karena ada awak redaksi yang menganggap besaran gempabumi tertentu, belum masuk kategori harus diberitakan. Di sisi berbeda, ada awak redaksi lainnya yang menilai, besaran gempabumi tersebut, telah layak untuk diberitakan.

Meski demikian, narasumber 3 menegaskan Metro TV juga telah memiliki Panduan Kebijakan dan Standar Berita, maka grafik informasi gempabumi yang masuk dari BMKG akan masuk dan dapat memotong program apa pun yang tengah berlangsung dan grafik akan ditampilkan di layar televisi dalam durasi minimal 30 detik. Tampilan dan durasi grafik tersebut akan bisa lebih panjang lagi, tergantung penilaian dari tim redaksi yang tengah bertugas di studio. Karena hal ini telah menjadi SOP maka secara otomatis setiap kru di studio telah diberi pengetahuan bagaimana menangani informasi gempabumi. Selain itu, produser dan tim redaksi juga akan segera memberi perhatian khusus atas informasi gempabumi yang masuk. Apalagi jika besaran gempabumi lebih dari 6 skala richter dan berpotensi tsunami.

Selanjutnya narasumber 4 menyatakan, saat informasi gempabumi diterima oleh *server* di stasiun televisi, tiap awak redaksi harus segera tanggap dan sigap dalam menyikapi informasi gempabumi yang terjadi. Tiap individu yang ada di ruang redaksi, seperti koordinator liputan

maupun produser program, harus segera membuat langkah-langkah antisipasi dan segera membuat rencana pemberitaan terhadap informasi gempabumi yang terjadi. Hal tersebut dapat berupa program siaran informasi berita terkini, masuk program berita buletin atau bahkan sampai dibentuk program breaking news. Beberapa program penyiaran tersebut terbentuk melalui diskusi yang cepat dan akurat, tentang informasi gempabumi yakni besaran, parameter dan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh gempabumi yang terjadi.

Tahapan yang dikerjakan oleh awak redaksi, antara lain dapat langsung mengunduh informasi yang berasal dari server BMKG berupa gambar grafis langsung, atau pengayaan data melalui grafik yang dibuat oleh awak redaksi. Pembuatan grafik tersebut untuk melengkapi dan memberi informasi yang lebih detil dan jelas kepada pemirsa televisi. Sehingga diharapkan informasi yang tersedia telah menjadi produk jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bagi narasumber 6, informasi gempabumi dengan besaran lima skala richter, patut menjadi informasi singkat di layar televisi. Namun hal itu juga harus mengacu pada data atau informasi gempabumi yang masuk, yakni kedalaman gempabumi serta apakah gempabumi tersebut berpotensi tsunami, berdasarkan analisis tim dari BMKG.

Kendala-kendala dalam implementasi pengartian informasi gempabumi di tiap awak redaksi, menandakan belum seragamnya pendapat dan sikap yang dilakukan awak redaksi dalam menyerap informasi gempabumi yang terjadi. Sehingga dibutuhkan interaksi komunikasi yang lebih intens antara BMKG sebagai pemangku kepentingan dengan media televisi nasional sebagai penyampai pesan kepada publik.

Pada manajemen informasi gempabumi di BMKG penulis menemukan bahwa sesuai dengan teori multisistem Grunig, terbentuk *problem facing employee*, karena anggota tim analisis gempabumi BMKG memiliki tingkat keterlibatan eksternal yang tinggi maupun tingkat keterlibatan internal yang rendah. Tim tidak harus berinteraksi aktif dengan atasan dalam menganalisa gempabumi dan menyebarkannya melalui mekanisme WRS atau secara otomatis. Meski tim pusat gempabumi dan tsunami harus memperoleh informasi gempabumi secara akurat.

Penulis berdasarkan wawancara terhadap narasumber 3, 4, 5, dan 6 menilai, penekanan informasi gempabumi yang dikeluarkan oleh BMKG tidak hanya dalam rangka mempengaruhi publik, namun informasi gempabumi tersebut telah diyakini oleh para awak redaksi di stasiun televisi sebagai informasi yang sangat dipecah. Selain itu, awak redaksi menggunakan informasi gempabumi itu, menjadi bahan berita yang sangat penting dan harus segera disebarkan ke pemirsa, untuk menjadi perhatian dan sebagai upaya diseminasi informasi dan mitigasi bencana.

Penulis menilai media televisi nasional saat ini, menjalankan informasi gempabumi yang masuk ke *server* media televisi tersebut secara otomatis. Jika informasi gempabumi dirasa cukup kuat untuk diberitakan, maka awak redaksi langsung melakukan penilaian singkat dan melakukan modifikasi informasi gempabumi yang disebarkan oleh tim BMKG. Modifikasi tersebut dalam bentuk pembaharuan informasi melalui pengayaan grafik dengan membuat detil-detil informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat atau pemirsa televisi yang bersangkutan.

Terdapat beberapa keunggulan menggunakan grafik dalam penyiaran. Pertama, desain dan bentuk grafik akan memberikan kesan kuat bagi para pemirsa tentang isi berita yang disampaikan. Kedua, grafik akan menyampaikan seluruh pendekatan jurnalistik bagi redaksi. (Smith, 2017). Narasumber 3 menjelaskan, gambar grafik tentang informasi gempabumi yang ada saat ini, telah di susun sedemikian rupa oleh BMKG dan manajemen

redaksi televisi nasional. Mulai dari pemilihan dan besarnya huruf, penempatan informasi dalam tampilan grafik dan warna yang terdapat dalam grafik informasi gempabumi yang disebarkan kepada media televisi nasional.

Menurut narasumber 5 tiap awak redaksi diharuskan melakukan sikap yang kritis dalam menerima setiap informasi yang berasal dari luar. Termasuk informasi gempabumi yang telah disebarkan oleh BMKG secara otomatis melalui sistem WRS. Narasumber 5 selalu menekankan, informasi gempabumi yang signifikan harus disertai konfirmasi aktual ke sumber berita dan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, di mana lokasi gempabumiterjadi dan menimbulkan dampak terhadap penduduk di sekitarnya. Pengayaan informasi dapat dilakukan dengan mencari sumber informasi di daerah yang terlanda gempabumi, melalui saluran telepon untuk menggali informasi yang lebih dalam, atau bahkan siaran live langsung, jika awak redaksi menilai hal tersebut perlu dilakukan.

Namun sekali lagi, narasumber 5 sebagai wakil pemimpin redaksi juga menilai BMKG harus sering memberikan pembelajaran dan bertukar pikiran dengan awak redaksi melalui pertemuan yang rutin sehingga tiap awak redaksi mendapat parameter yang kuat dalam menentukan dan membuat berita dari informasi gempabumiyang masuk ke server di media televisi yang bersangkutan. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang tepat dari informasi gempabumidan akan menghasilkan keluaran berita yang tajam dan akurat tentang informasi gempabumiyang terima awak redaksi.

Berbeda dengan TVRI, narasumber 6 mengungkapkan *server* yang ditempatkan oleh BMKG di kantor TVRI pusat di Senayan, Jakarta Pusat, tidak berfungsi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena jarak antara ruang redaksi dengan *master control* di studio pusat TVRI berjarak lebih dari 50 meter dan tidak ada mekanisme langsung siar, yang terdapat di TVRI jika informasi masuk ke *server*. Narasumber 6 menjelaskan, jika informasi gempabumi masuk, maka awak redaksi harus membuat grafik baru, menyimpannya ke perangkat penyimpanan data seperti *flash disk*, kemudia membawa grafik data gempabumi tersebut ke ruang *master control* di studio, untuk kemudian ditayangkan ke layar kaca.

Narasumber 6 juga menyatakan kesulitan lainnya, karena BMKG hanya menempatkan *server* di *master control* di redaksi pusat TVRI, maka penyampaian informasi gempabumi secara cepat dan tepat tidak efektif. Sehingga untuk menyebarkan ke redaksi di stasiun TVRI daerah seluruh Indonesia, masih menggunakan sms seperti saat ini, dan mengakibatkan informasi gempabumi yang sampai di redaksi TVRI di daerah menjadi terlambat. Narasumber 6 menyadari kelemahan ini, karena TVRI daerah tidak memiliki alat server informasi gempabumi, seperti yang ditempatkan BMKG ke TVRI pusat. Namun narasumber 6 menyatakan TVRI membekali awak redaksi TVRI di daerah dengan radio panggil untuk menyebarkan informasi gempabumi.

Kesulitan yang dirasakan narasumber 6, yakni adanya siaran lokal di TVRI daerah. Hal tersebut bedasarkan kontrak TVRI daerah yang terikat dalam siaran muatan lokal, antara pukul 16.00-19.00 WIB. Sehingga, saat jam siaran lokal tersebut berlangsung dan terjadi gempabumi, maka TVRI harusnya menggunakan *system news ticker*, untuk menginformasikan gempabumi secara cepat kepada pemirsanya. Narasumber 6 selalu harus mengingatkan kepada awak redaksi TVRI di daerah, narasumber 6 pun berharap peristiwa gempabumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004, jangan sampai terulang lagi.

Terkait tujuan BMKG dalam menyampaikan informasi gempabumi agar media penerima informasi gempabumi memiliki fungsi *Newsworthy Information*; dengan kata lain setiap organisasi penting untuk menyampaikan hal-hal yang bernilai berita kepada media massa guna menciptakan perhatian pada publik. Berita dapat berisikan informasi mengenai aksi,

perubahan, kontroversi, konflik dan hal lainnya. mengakronimkannya sebagai SiLoBaTi+UnFa, yakni isi utama dari pemberitaan adalah, signifikan, lokal, *balance* (berimbang), *timeliness* (aktual), *Unusualness* (unik), dan *Fame* (dikenal), (Smith, 2017). Maka penulis menilai apa yang dilakukan BMKG telah maksimal dengan menggandeng beberapa media televisi nasional, dalam bekerjasama untuk meningkatkan layanan agar informasi gempabumi dapat tersaji dengan cepat dan tepat.

Hal ini sesuai dengan pemaparan narasumber 3, yang kerap diundang oleh BMKG untuk mendiskusikan perkembangan dan pemutakhiran teknologi dalam menyampaikan informasi gempabumi yang terjadi di Indonesia. Narasumber 3 juga menilai, jika mekanisme informasi gempabumi yang disiarkan telah melalui jalur SOP yang ketat dan terpercaya. Sehingga isi utama berita informasi gempabumi yang dikeluarkan oleh BMKG, telah memenuhi unsur SiLoBaTi+UnFa, yakni isi utama dari pemberitaan adalah, signifikan, lokal, *balance* (berimbang), *timeliness* (aktual), *Unusualness* (unik), dan *Fame* (dikenal). Hal tersebut juga dibenarkan oleh narasumber 4, 5 dan 6 yang menyatakan informasi gempabumi yang dikeluarkan oleh BMKG sangat layak dipercaya, sehingga awak redaksi akan langsung menyiarkannya, meski harus terus memperbaharui informasi gempabumi lanjutan.

Narasumber 2 menjelaskan pada tahun 2014, BMKG telah menyelenggarakan program *online focus discussion* (OGB). Contohnya: terdapat acara OGD yang sebetulnya mengadopsi dari *Regional Focus Group Meeting* (RFG) yang telah secara rutin diikuti oleh staf BMKG. Kegiatan bulanan RFG diselenggarakan oleh WMO VLab *Center of Excellence Melbourne* pada tiap hari selasa pekan pertama tiap bulannya dengan tema tertentu.

Mengutip pernyataan Kepala BMKG, Andi Eka Sakya dalam pertemuan media se Asia Pasifik, yang menjelaskan pentingnya peran media terhadap penyebaran informasi kebencanaan. Karena media menjadi pilar penting untuk mengurangi korban akibat bencana. Tidak hanya sistem peringatan dini yang bekerja, tapi juga dibutuhkan peran media dalam penyebaran informasi kebencanaan.

Selain itu, Andi Eka Sakya juga menyampaikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau membuatnya rentan terhadap bencana alam, seperti gempabumi, tsunami, banjir, dan kekeringan. BMKG dalam hal ini telah mengoperasikan 179 stasiun pengamatan, 164 AWS, 34 radar, 267 *Accelerograph* atau instrumen yang dipergunakan untuk mencatat guncangan tanah yang sangat intens dan mengukur percepatan permukaan tanah., 31 *sirine*, dan 50 DVBS. Sedangkan produk informasi yang dihasilkan disebarkan melalui fax, *web*, sms, elektronik dan sosial media. Penerima produk informasi ini adalah instansi terkait dan masyarakat umum.

BMKG menurut narasumber 2 belajar mitigasi bencana dari Jepang tentang bagaimana menindaklanjuti informasi gempabumibumi. Seperti yang dilakukan Stasiun TV NHK Jepang yang memiliki 500 unit kamera beresolusi tinggi dan dapat digerakan dengan *remote controle*, mampu menangkap peristiwa bencana di seluruh Jepang. Kejadian gempabumi, tsunami, badai sehingga dapat langsung disiarkan sebelum reporter datang ke tempat kejadian.

Narasumber 2 menjelaskan stasiun TV NHK menempatkan kamera di berbagai lokasi yang memiliki potensi bencana, seperti bandara, pantai, jalan raya atau pusat kota. Posisi kamera berada pada menara atau gedung yang dapat menangkap suatu obyek dengan baik. Selain Kamera, Stasiun TV NHK Japan ini juga memiliki transportasi helikopter yang memungkinkan reporter bergerak cepat untuk dapat menginformasikan kejadian secara langsung. Informasi yang tersaji dengan cepat ini tentunya dapat mengurangi resiko bencana. karena *civil defiance* (pihak berwenang) dan masyarakat dapat segera melakukan evakuasi.

Narasumber 6 menilai apa yang dilakukan NHK sangat dibutuhkan untuk membantu korban, dapat segera dipenuhi. Ternyata media tidak hanya reportase, media juga dapat menjadi inisiator ataupun mediator untuk melakukan adaptasi dan mitigasi bencana. Selanjutnya narasumber 2 berharap, kru redaksi dari media nasional di Indonesia dapat belajar, tentang bagaimana media mampu berperan dalam diseminasi informasi gempabumi dan penyebarannya. Selain itu, pertemuan rutin juga diharapkan mampu mengurangi dampak terputusnya komunikasi antara BMKG dengan awak redaksi stasiun televisi nasional maupun lokal, yang notabene telah menjadi salah satu pihak yang berkepentingan dalam menjalankan fungsi diseminasi informasi gempabumi.

SIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dan pembahasan penulis menyimpulkan; pusat gempabumi dan tsunami BMKG menjalankan sistem operasional prosedur yang ketat dalam manajemen informasi gempabumi. Komunikasi publik yang terjadi merupakan interaksi antara individu dalam tim pengamat peringatan dini gempabumi dan tsunami BMKG dengan individu redaksi di televisi nasional. Komunikasi publik yang terjadi di BMKG berjalan dalam bentuk linier, dan memiliki karakteristik transaksional.

Proses komunikasi publik dalam penyampaian informasi gempabumi oleh BMKG terbagi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal, mengacu pada komunikasi antar tim dan atasan dalam interaksi analisis informasi gempabumi. Melalui penyebaran informasi gempabumi, BMKG memainkan perannya dalam komunikasi publik eksternal, dengan makna bagaimana organisasi BMKG beradaptasi dan mempengaruhi publik secara luas, termasuk pihak yang berkepentingan, komunitas, media dan pembuat kebijakan. Organisasi BMKG menggunakan komunikasi publik untuk menciptakan, menegaskan, dan memperkuat imej mereka ketika dibutuhkan, mempengaruhi pembuat kebijakan dan isu-isu yang dianggap penting oleh BMKG.

Peran penting penyampaian komunikasi kepada publik dapat dilihat pada pertemuan informal, pertemuan semiformal, pertemuan formal antaran BMKG dan pengelola redaksi media televisi nasional. Karena komunikasi yang terjalin antara BMKG dengan awak redaksi masih terjadi dalam tataran fokus pada aspek kognitif atau kesadaran telah dilakukan, tetapi masih ada kekurangan dalam menggali aspek afektif dan konatif, yang berkaitan dengan perubahan perilaku. Selain itu, analisis pemangku kepentingan belum dilakukan secara menyeluruh, dengan penekanan hanya pada kebutuhan badan publik negara dalam hal ini BMKG.

Kegiatan pengembangan pelayanan informasi gempabumi kepada masyarakat dilakukan melalui studi dokumen, pertemuan rutin dan *Focus Group Discussion* (FGD) secara *online*, selain itu BMKG ikut serta menggelar dan menyelenggarakan seminar bertaraf regional dan internasional.

Hingga saat ini, belum ada evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan komunikasi publik BMKG yang bersifat metodologis dan berdasarkan data kuantitatif, terutama dalam konteks penyebaran informasi tentang gempa bumi kepada media televisi nasional. Evaluasi yang telah dilakukan pada komunikasi publik adalah penilaian berdasarkan klaim hasil yang nyata atau penilaian berdasarkan pandangan (*judgmental assessment*), serta hasil yang diperoleh dari kegiatan komunikasi tersebut.

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengusulkan bahwa penyampaian informasi mengenai gempa bumi masih mengalami tingkat perlawanan yang tinggi dan kurangnya partisipasi dari pihak awak redaksi televisi. Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang

disarankan adalah melakukan perbincangan ilmiah mengenai rancangan komunikasi publik, karena aliran informasi antara BMKG dan publik melalui televisi nasional masih belum optimal.

Dalam pengelolaan komunikasi publik, sebaiknya BMKG fokus pada pengukuran dampak yang dapat diidentifikasi secara jelas dan diukur dengan indikator akademis yang ketat. Saat ini, efektivitas komunikasi publik belum mencakup elemen-elemen seperti tingkat paparan pesan, evaluasi tingkat kesadaran, penerimaan, dan partisipasi. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi untuk mengubah perilaku badan publik dan media televisi nasional, dengan menggunakan alat komunikasi massa, forum advokasi, serta konsultasi yang bersifat khusus. Melalui penyebaran informasi gempabumi kepada media televisi nasional, penulis menyarankan agar BMKG menjalankan komunikasi publik dengan fokus tidak hanya pada pengiriman pesan untuk mempengaruhi khalayak, tetapi juga harus difokuskan pada bagaimana khalayak mencari dan mendapat informasi.

Untuk meningkatkan pemahaman mengenai situasi komunikasi publik, BMKG seharusnya menerapkan metode riset formal seperti survei, analisis konten, dan polling. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mengumpulkan informasi obyektif dan mengurangi ketidakpastian dalam merancang rencana komunikasi terkait penyebaran informasi gempa bumi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Daado, J., Handayani, R., & Susilawaty, F. T. (2023). Strategi Komunitas Sultra Island Care Dalam Meningkatkan Minat Baca Di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 2(4). <https://doi.org/10.52423/jlpi.v2i4.27780>
- Emerald alamsyah, ichan. (2019). Gubernur: Total Korban Bencana di Sulteng Capai 4.340 Orang. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/29/pm3nb1349-gubernur-total-korban-bencana-di-sulteng-capai-4340-orang?>
- Grunig, J. E. (2013). Excellence in public relations and communication management. In *Excellence in Public Relations and Communication Management*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203812303>
- Grunig, L. A., Grunig, J. E., & Dozier, D. M. (2003). Excellent public relations and effective organizations: A study of communication management in three countries. In *Excellent Public Relations and Effective Organizations: A Study of Communication Management in Three Countries*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781410606617>
- Kunci, K. (2010). Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya. *Gempa Bumi, Tsunami Dan Mitigasinya*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/jg.v7i1.92>
- Maxmanoe.com. (2019). *Pengertian Logistik, Tujuan, Manfaat dan Aktivitas Logistik Menurut Para Ahli Terlengkap*. 8 Februari.
- Mutia annur, chindy. (2023). *Inilah 10 Gempa Bumi Terbesar Sepanjang Sejarah , Dua di Antaranya dari Indonesia*. 2023.
- Rafael Alesandro Marbun. (2023). Analisis Dinamika Atmosfer Terkait Kejadian Hujan Lebat di Naha. *BMKG*. <https://www.bmkg.go.id/artikel/?p=analisa-dinamika-atmosfer-terkait-kejadian-hujan-lebat-di-naha&tag=&lang=ID>
- Smith, R. D. (2017). Strategic planning for public relations: Fifth edition. In *Strategic*

Planning for Public Relations: Fifth Edition. <https://doi.org/10.4324/9781315270876>

Wiji utomo, Y. (2012). 230 Gempa Besar Terjadi selama 2012. *Kompas.Com.*
<https://sains.kompas.com/read/2012/12/31/14333578/230.Gempabumi.Besar.Terjadi.Selama.2012>

Wyman, G. A. (1999). *the Excellence Reform Movement: Sixteen Years Later Teacher Perspectives From an Arizona School District.*